

Pengaruh *Corporate Governance* dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance*: Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2017-2019

Meiranti Andriyani¹⁾, Endang Mahpudin²⁾

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Singaperbangsa Karawang

*Email korespondensi: 1710631030109@student.unsika.ac.id

Abstract

Tax avoidance is a part of tax planning that is conducted legally. Tax Avoidance is conducted by the taxpayer (the company) to minimize the company's tax burden. The purpose of this research is to test how large the influence of corporate governance variables consist of institutional ownership, independent commissioner, audit quality, and audit committee and fiscal loss compensation variables in influencing tax evasion in mining companies listed on IDX (Indonesia Stock Exchange). The author uses secondary data of financial statements published by the mining companies listed on the IDX (Indonesia Stock Exchange). The results of this study indicate that the variables of institutional ownership, independent commissioner, and audit committee have significant influence on tax avoidance, while variable audit quality and fiscal loss compensation has no significant effect on tax avoidance on mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange period 2017-2019. The samples used in this study were taken using the purposive sampling method. After a reduction with multiple criteria, set as many as 12 companies as samples. The analysis techniques on this study used a linear regression analysis with the help of SPSS 25 edition program.

Keywords: *Fiscal Loss Compensation; Good Corporate Governance; Tax Avoidance.*

Saran sitasi: Andriyani, M., & Mahpudin, E. (2021). Pengaruh *Corporate Governance* Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance*: Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2017-2019. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21 (2), 490-499. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i2.1448>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i2.1448>

1. PENDAHULUAN

Pengertian pajak menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah di UU No. 16 Tahun 2009, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak memperolehtimbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan suatu faktor yang penting bagi sebuah negara, terutama bagi negara yang sedang berkembang karena pajak merupakan sumber penerimaan negara tersebut. Sedangkan bagi suatu perusahaan, pajak merupakan salah satu beban atau biaya yang jumlahnya cukup besar (Hendro Subroto, Danarsi, 2017).

Oleh karena, itu perusahaan harus dapat mengelola beban perpajakannya dengan baik agar bisa mendapat laba perusahaan yang optimal. Dalam

mengelola beban perpajakan tersebut perusahaan dapat melakukan manajemen pajak, dengan cara *tax planning* (Kovermann & Velte, 2019). Salah satu strategi *tax planning* adalah dengan melakukan *tax avoidance* atau yang bisa disebut sebagai penghindaran pajak secara legal, yang diharapkan juga dapat meningkatkan nilai perusahaannya. Nilai perusahaan yang tinggi akan menarik investor untuk menanam modalnya karena perusahaan tersebut dapat menghasilkan laba yang optimal. Sehingga menurut Subarkah & Dewi (2017), *tax avoidance* merupakan fenomena yang terjadi dalam suatu keadaan tertentu yang diatur yang menyebabkan pengurangan beban pajak. Tindakan *tax avoidance* dapat meningkatkan nilai perusahaan, karena laba yang di dapat oleh perusahaan akan semakin besar.

Menurut Beer (2018), *tax avoidance* atau penghindaran pajak dilakukan secara global di seluruh dunia. Sementara sistem yang berlaku atas peraturan

pajak itu sendiri dapat menjadi dasar untuk melakukan penghindaran pajak. Salah satu cara yang bisa digunakan dalam menghindari pajak adalah dengan membuat penangguhan pajak, yaitu menunda pembayaran yang terkadang tanpa batas waktu. Namun peraturan perpajakan di setiap negara berbeda sehingga perlu disesuaikan kembali terhadap kondisi perusahaan dan peraturan di negara itu sendiri.

Pemerintah Indonesia mengharapkan wajib pajak membayar pajak sesuai kondisi sebenarnya sedangkan perusahaan berusaha membayar pajak seminimal mungkin dengan melakukan manajemen pajak tanpa melanggar peraturan, yang artinya hal ini dilakukan secara legal dan diperbolehkan. Tuntutan bagi perusahaan melakukan manajemen pajak yang harus diawasi menjadikan dibentuknya *Corporate Governance* (Supatminingsih & Wicaksono, 2017). Penghindaran pajak dilakukan dengan tiga cara, yang pertama adalah menahan diri, yang kedua adalah pindah lokasi, dan yang terakhir adalah penghindaran pajak secara yuridis. Tuntutan bagi perusahaan dalam melakukan manajemen pajak yang harus diawasi menjadikan dibentuknya *corporate governance* yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya transparansi, *accountability*, *responsibility*, *independency* dan *fairness* (Sunarsih & Oktaviani, 2016).

Pajak perusahaan dihitung berdasarkan suatu dasar, yaitu penghasilan atau laba dikalikan suatu tarif tertentu dalam persentase. Terdapat beberapa jenis tarif untuk menghitung pajak, yaitu tarif yang ditentukan undang-undang, tarif rata-rata, tarif marginal, dan tarif efektif yang dibagi lagi menjadi tarif efektif rata-rata dan tarif efektif marginal. Penulis menggunakan tarif penghindaran pajak ke dalam *Effective Tax Rates* (ETR). Berkaitan dengan variabel yang diteliti yaitu *corporate governance* dan *fiscal loss compensation*, dari sisi struktur tata kelola perusahaan *corporate governance* dalam suatu perusahaan bertujuan agar terciptanya suatu tata kelola perusahaan yang baik, efektif dan efisien. Mekanismenya mengatur bagaimana cara agar perusahaan terus berkembang dengan baik, dengan laba yang optimal, tidak melanggar aturan pemerintah, serta taat dalam pembayaran pajak.

Dalam penelitian ini, *corporate governance* terdiri dari kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit. Proksi komposisi komisaris independen diukur menggunakan persentase jumlah komisaris

independen terhadap jumlah total komisaris dalam susunan dewan komisaris perusahaan sampel tahun amatan yang ada di dalam daftar perusahaan pertambangan terdaftar BEI periode 2017 sampai dengan 2019. Faktor keuangan selanjutnya yang menjadi variabel penelitian yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu kompensasi rugi fiskal (*fiscal loss compensation*). Perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntan diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan. Kompensasi rugi fiskal dapat diukur menggunakan variabel dummy, yang akan diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun *t* (Lestari & Solikhah, 2019).

Penelitian Marfirah dan Syam (2016) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit, komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian Tandean dan Winnie (2016) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*, namun komisaris independen dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian Jamei (2019) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kemudian, penelitian Reinaldo (2016) menunjukkan bahwa kompensasi kerugian fiskal berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* namun pada penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2018) menunjukkan bahwa kompensasi kerugian fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian-penelitian lain pun telah dilakukan dan menghasilkan suatu kesimpulan yang beragam. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang masalah tersebut, terbentuklah rumusan masalah sebagai berikut, antara lain (1) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*? (2) Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*? (3) Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*? (4) Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*? (5) Apakah kompensasi kerugian fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional,

komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit terhadap *tax avoidance*, serta untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompensasi kerugian fiskal terhadap *tax avoidance*. Manfaat dari penelitian ini adalah (1) Manfaat Teoritis, dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya pada waktu yang akan datang khususnya yang membahas tentang pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit terhadap *tax avoidance*. (2) Manfaat Praktis, dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan terkait penghindaran pajak, khususnya manajer.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “**Pengaruh Corporate Governance Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2017-2019**”. Kemudian berikut ini adalah permasalahan penelitian yang dapat dirumuskan, yaitu sebagai berikut:

- Apakah ada pengaruh dari Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)?
- Apakah ada pengaruh dari Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)?
- Apakah ada pengaruh dari Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)?
- Apakah ada pengaruh dari Komite Audit terhadap Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)?
- Apakah ada pengaruh dari Kompensasi Rugi Fiskal perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kausalitas dengan menggunakan analisa statistik kuantitatif dan uji hipotesa. Diharapkan dengan metode tersebut akan didapatkan temuan model yang menggambarkan secara sistematis dan akurat yang dapat dipakai sebagai alat deteksi dan prediksi mengenai perusahaan yang melakukan penghindaran pajak.

2.1. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019. Dalam penelitian ini, perusahaan yang menjadi sampel dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling* (kriteria yang dikehendaki). Kriteria sampel yang ditentukan penulis adalah sebagai berikut:

- Perusahaan yang menjadi sampel tidak delisting, yaitu mengalami penghapusan saham oleh bursa efek selama periode tahun penelitian 2017-2019.
- Perusahaan yang secara lengkap mempublikasikan laporan keuangannya selama periode tahun penelitian 2017-2019.
- Laporan keuangan dinyatakan dalam nilai rupiah.
- Perusahaan pertambangan yang memiliki data mengenai variabel penelitian (kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit, komite audit dan kompensasi kerugian fiskal) pada tahun 2017-2019.

Tabel 1

Kriteria Pemilihan Sample

Kriteria	Jumlah
Jumlah perusahaan pertambangan yang ada di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019	48
Jumlah perusahaan dengan data yang tidak memenuhi kriteria, seperti contohnya perusahaan yang mengalami <i>delisting</i> atau tidak <i>listing</i> selama 3 tahun berturut-turut termasuk saat periode penelitian pada tahun 2017-2019	(1)
Jumlah perusahaan pertambangan yang tidak menyajikan data secara lengkap selama periode 2017-2019	(35)
Jumlah perusahaan yang menjadi sampel penelitian	12
Tahun penelitian	3
Total Observasi dalam penelitian (12 x 3)	36

Sumber : www.idx.co.id (data diolah tahun 2020)

2.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dimana data diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data penelitian diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu pada situs www.idx.co.id dan web resmi perusahaan sampel pada tahun 2017-2019.

2.3. Teknik dan Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda yang menggunakan program SPSS versi 25 untuk melakukan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heterokendatisitas) dan uji hipotesis (uji statistik F, uji statistik t dan koefisien determinasi).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Data dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan mulai tahun 2017-2019. Sampel Uji Statistik Deskriptif

perusahaan yang berhasil diperoleh dalam penelitian ini sebanyak 12 perusahaan dengan total data 48 laporan keuangan perusahaan. Perolehan data yang digunakan melalui website www.idx.co.id.

Tabel 2
Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kepemilikan Institusional	36	0,3779	0,9547	0,601758	0,1594975
Komisaris independen	36	0,30	0,50	0,3833	0,08106
Kualitas Audit	36	0	1	0,42	0,500
Komite Audit	36	3	5	3,25	0,604
Kompensasi Kerugian Fiskal	36	0	1	0,06	0,232
Tax Avoidance	36	0,2177	0,9078	0,369615	0,1592715
Valid N (listwise)	36				

Sumber : Data sekunder yang diolah di SPSS versi 25

Berdasarkan tabel 2 uji statistik deskriptif, variabel kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan *tax avoidance* memiliki nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas data dari variabel tersebut baik, karena nilai rata-rata yang lebih besar dari nilai standar deviasinya mengidentifikasi bahwa standar error dari variabel tersebut kecil. Namun pada variabel kualitas audit dan kompensasi kerugian fiskal, nilai rata-ratanya lebih kecil daripada standar deviasi sehingga menunjukkan bahwa data dalam variabel kurang terdistribusi dengan baik dibandingkan dengan variabel kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan *tax avoidance*.

Hasil Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini ada beberapa uji asumsi klasik yang digunakan yaitu uji normalitas data, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas data dalam penelitian ini menggunakan statistik Kolmogorov – Smirnov Test dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05, sehingga data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5%. Berikut hasil perhitungannya:

Tabel 3
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,11220798
Most Extreme	Absolute	0,146
Extreme	Positive	0,146
Differences	Negative	-0,066
Test Statistic		0,146
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,051 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Data sekunder yang diolah di SPSS versi 25

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat pada Asymp. Sig. (2-tailed) diketahui nilai signifikansinya adalah 0,051 lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi terdistribusi secara normal.

Uji Autokorelasi

Untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi maka dilakukan pengujian Durbin – Watson (DW test). Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, maka nilai DW akan dibandingkan dengan DW tabel. Berikut ini adalah tabel hasil perhitungan dari SPSS:

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b				
R	R Square	Adj. R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
0,710 ^a	0,504	0,421	0,1211985	1,841

a. Predictors: (Constant), Kompensasi Kerugian Fiskal, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Kualitas Audit, Komisaris independen

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber : Data sekunder yang diolah di SPSS versi 25

Maka dari data di atas, didapatkan tabel hasil perhitungan untuk membandingkan nilai Durbin – Watson dengan Durbin – Watson Tabel, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5
Tabel Nilai Durbin – Watson

DW	dL	dU	4-dU	Kesimpulan
1,841	1,1755	1,7987	2,2013	Tidak ada Autokorelasi

Dengan nilai N sebanyak 36 observasi dan jumlah variabel bebas sebanyak 5 variabel maka didapatkan nilai dL sebesar 1,1755 dan dU sebesar 1,7987. Nilai Durbin – Watson (DW) sebesar 1,841 lebih besar dari batas atas (dU) yakni 1,7987 dan kurang dari (4-dU) yakni 2,2013. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam Uji Durbin – Watson diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi.

Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat perolehan nilai Variance Inflance Factor (VIF) dan nilai tolerance dari model regresi untuk masing-masing variabel bebas. Hasil dari perhitungan menggunakan aplikasi SPSS versi 25 menghasilkan nilai pada tolerance dan VIF, kemudian disederhanakan langsung disandingkan dengan standar pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a				
Variabel Independen	Collinearity Statistics			
	Tolerance	Standar	VIF	Standar
Kepemilikan Institusional	0,949	0,10	1,05	10
Komisaris independen	0,526	0,10	1,90	10
Kualitas Audit	0,537	0,10	1,86	10
Komite Audit	0,882	0,10	1,13	10
Kompensasi Kerugian Fiskal	0,900	0,10	1,11	10

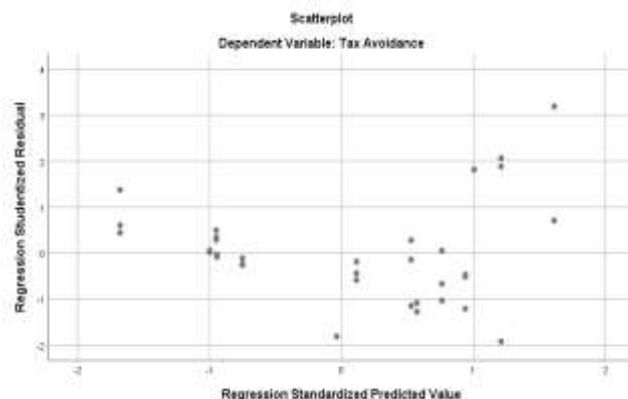
Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber : Data sekunder yang diolah di SPSS versi 25

Berdasarkan tabel diatas, uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai VIF semua variabel bebas kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,10, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tidak ada multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Cara menguji ada tidaknya heteroskedastisitas, yaitu dengan grafik Scatterplot. Apabila titik-titik menyebar di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Berikut ini adalah gambar hasil uji heteroskedastisitas akan disajikan dalam bentuk grafik scatterplot:



Gambar 1

Grafik Scatterplot Hasil Uji Heteroskedastisitas
(Sumber: SPSS versi 25)

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa titik menyebar dan tidak membentuk pola khusus. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel yang digunakan tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji t

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 0,05 (5%) maka suatu variabel independen menunjukkan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis diterima jika nilai signifikan (a) < 0,05 dan hipotesis ditolak jika nilai signifikannya (a) > 0,05. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7
Hasil Uji T

Coefficients^a				
Hipotesis	T_{hitung}	T_{tabel}	Sig	Standar
Kepemilikan Institusional	-3,300	2,042	0,002	0,05
Komisaris Independen	3,471	2,042	0,002	0,05
Kualitas Audit	1,277	2,042	0,211	0,05
Komite Audit	3,367	2,042	0,002	0,05
Kompensasi Kerugian Fiskal	-0,738	2,042	0,466	0,05

Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber : Data sekunder yang diolah di SPSS versi 25

Setelah perhitungan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hipotesis	Kesimpulan
Kepemilikan Institusional	Diterima
Komisaris Independen	Diterima
Kualitas Audit	Ditolak
Komite Audit	Diterima
Kompensasi Kerugian Fiskal	Ditolak

Hasil Uji Koefisien

Determinasi Koefisien determinasi berkisar diantara angka 0 sampai angka 1. Makin kecil nilai koefisien determinasi maka akan kecil kemampuan variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikat, begitu juga sebaliknya. Hasil pengujian dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,710 ^a	0,504	0,421

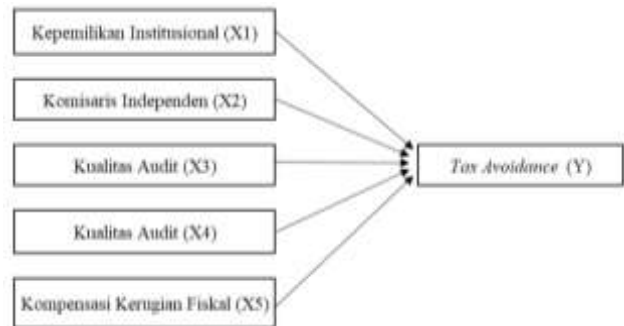
Sumber : Data sekunder yang diolah di SPSS versi 25

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan nilai R-Square yang besarnya 0,504 menunjukan bahwa proporsi pengaruh variabel kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit, komite audit, dan kompensasi kerugian fiskal terhadap penghindaran pajak sebesar 50,4%.

3.2. Pembahasan

Pada penelitian dapat ditemukan bukti empiris mengenai kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan kompensasi kerugian fiskal terhadap *tax avoidance* pada tahun 2017-2019 dengan obyek penelitian adalah

perusahaan pertambangan yang listing di BEI. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa dari 5 variabel independen, hanya tiga variabel berpengaruh terhadap *tax avoidance* yaitu variabel kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit. Sebelum memasuki pembahasan, berikut ini ilustrasi hubungan antar variabel menggunakan bagan kerangka pemikiran:



Gambar 2
Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual pemikiran diatas dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi keterkaitan antara variabel yang diteliti berdasarkan rumusan masalah, keterkaitan maupun hubungan antar variabel yang diteliti diuraikan dengan berpijak pada kajian teori diatas. Berdasarkan analisis dan penelitian yang telah dilakukan terhadap variabel-variabel tersebut, ada beberapa hal yang dapat diambil yaitu sebagai berikut:

a. Variabel Kepemilikan Institusional

Berdasarkan perhitungan pada SPSS, hasil pengujian untuk variabel jumlah anggota kepemilikan institusional memiliki nilai probabilitas sebesar 0,002. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa apabila nilai probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 0,05 (5%) maka suatu variabel independen menunjukkan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis diterima jika nilai signifikan < 0,05 dan hipotesis ditolak jika nilai signifikannya > 0,05. Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 sehingga artinya hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa jumlah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak dapat diterima. Di dalam tabel uji T, variabel ini berbanding terbalik (*negative*) terhadap penghindaran pajak, yang artinya apabila semakin tinggi kepemilikan institusional dalam

suatu perusahaan, maka kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak semakin kecil. Pernyataan ini didukung dengan pendapat Chen, Huang, Li, & Shevlin (2019) yang menyatakan bahwa persentase saham institusi adalah penjumlahan atas persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga baik yang berada di dalam atau di luar negeri. Perusahaan yang kepemilikan sahamnya lebih besar maka kinerja manajemen untuk dapat memperoleh laba yang diinginkan akan cenderung diawasi oleh investor institusi tersebut. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kuat kendali yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap perusahaan. Ketika kepemilikan institusional menurun, maka *tax avoidance* akan mengalami kenaikan, dan sebaliknya.

b. Komisaris Independen

Berdasarkan perhitungan pada SPSS, hasil pengujian untuk variabel jumlah komisaris independen memiliki nilai probabilitas sebesar 0,002 sama dengan nilai probabilitas pada variabel kepemilikan institusional. Apabila nilai probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 0,05 (5%) maka suatu variabel independen menunjukkan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis diterima jika nilai signifikan $< 0,05$ dan hipotesis ditolak jika nilai signifikannya $> 0,05$. Variabel komisaris independen memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 sehingga artinya hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa jumlah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak diterima. Hal ini berarti bahwa dalam perusahaan yang menjadi penelitian, selain komisaris independen berperan secara signifikan dalam pengambilan keputusan pajak strategis perusahaan pertambangan di Indonesia. Di dalam tabel uji T pun dapat dilihat bahwa ternyata jumlah komisaris independen berpengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh pendapat Romdhon (2015), bahwa dalam *good corporate governance* terdapat komisaris independen yang berperan penting sebagai kekuatan penyeimbang (*controleing power*) di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Maksud dari pernyataan ini bahwa apabila komisaris independen memiliki jumlah yang lebih banyak daripada yang

seharusnya, perannya sebagai penyeimbang akan kurang efektif dikarenakan komisaris independen sendiri merupakan komisaris dari pihak luar yang diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Maka, semakin banyak jumlah anggota komisaris independen maka saat diadakan rapat kepentingan terjadilah kemungkinan-kemungkinan permasalahan mengenai kepentingan pribadi atau kelompok dari pihak komisaris independen sehingga kurang mengkomodir kepentingan perusahaan.

c. Kualitas Audit

Berdasarkan perhitungan pada SPSS yang telah dilakukan, hasil pengujian untuk variabel kualitas audit memiliki nilai probabilitas sebesar 0,211. Apabila nilai probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 0,05 (5%) maka suatu variabel independen menunjukkan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis diterima jika nilai signifikan $< 0,05$ dan hipotesis ditolak jika nilai signifikannya $> 0,05$. Variabel kualitas audit memiliki nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 sehingga artinya hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak ditolak. Dimensi kualitas auditor yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran Kantor Akuntan Publik atau KAP. Menurut Wulandari (2019), KAP Big Four dianggap lebih berkualitas karena dengan serangkaian pelatihan dan prosedur serta memiliki program audit yang dianggap lebih akurat dan efektif dibandingkan dengan KAP non-Big Four. Penelitian ini menggunakan perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik The Big Four yaitu Price Waterhouse Cooper-PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst dan Young- E dan Y akan diberi nilai 1, dan apabila tidak diaudit oleh KAP The Big Four akan diberi nilai 0 (Alviyani, Surya, & Rofika, 2016). Perhitungan pada tabel SPSS di atas menunjukkan bahwa kualitas audit secara parsial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, ini artinya KAP yang berkualitas tidak menghendaki adanya tindakan *tax avoidance*. Kualitas audit yang baik tidak akan membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak, maka dari itu variabel kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, oleh karena itu penemuan di atas memberikan arti bahwa kualitas audit yang

dimiliki oleh perusahaan pertambangan di Indonesia tidak berkontribusi terhadap penghindaran pajak.

d. Komite Audit

Berdasarkan perhitungan pada SPSS yang telah dilakukan, hasil pengujian untuk variabel komite audit memiliki nilai probabilitas sebesar 0,002. Apabila nilai probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 0,05 (5%) maka suatu variabel independen menunjukkan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis diterima jika nilai signifikan < 0,05 dan hipotesis ditolak jika nilai signifikannya > 0,05. Variabel komite audit memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 sehingga artinya hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak diterima. Variabel komite audit berpengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyaknya jumlah komite audit, maka semakin baik pula perusahaan dalam melakukan pengawasan terhadap penghindaran pajak.

e. Kompensasi Kerugian Fiskal

Berdasarkan perhitungan pada SPSS yang telah dilakukan, hasil pengujian untuk variabel kompensasi kerugian fiskal memiliki nilai probabilitas sebesar 0,466. Apabila nilai probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 0,05 (5%) maka suatu variabel independen menunjukkan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis diterima jika nilai signifikan < 0,05 dan hipotesis ditolak jika nilai signifikannya > 0,05. Variabel kompensasi kerugian fiskal memiliki nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 sehingga artinya hipotesis kelima (H5) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak ditolak. Variabel kompensasi kerugian fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kompensasi rugi fiskal suatu perusahaan maka akan semakin rendah nilai penghindaran pajak yang dilakukan di perusahaan tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Lestari & Solikhah (2019) bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, karena kerugian tersebut dapat mengurangi beban pajak pada tahun berikutnya. Perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi

diberikan keringanan untuk membayar pajaknya, tanpa perlu melakukan *tax avoidance*. Oleh karena itu, penemuan di atas memberikan arti bahwa kompensasi rugi fiskal yang dimiliki oleh perusahaan pertambangan di Indonesia tidak berkontribusi terhadap upaya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Implikasi teoritis dari penelitian ini yaitu bahwasanya penelitian ini mampu menambah wawasan dan pengetahuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi keuangan yang berhubungan dengan urusan perpajakan, dengan data sampel terbaru yang bisa didapatkan peneliti. Sedangkan secara praktis, penelitian ini bisa digunakan sebagai dasar BEI dan OJK untuk mengawasi kembali *good corporate governance* di perusahaan-perusahaan yang terdaftar, untuk mengawasi apakah peran kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit, komite audit dan bahkan mengawasi pula mengenai kompensasi kerugian fiskal apakah variabel-variabel tersebut mampu menurunkan praktik penghindaran pajak perusahaan atau sebaliknya. Implikasi penelitian ini juga bermaksud menjelaskan kepada perusahaan-perusahaan, bahwa sesungguhnya apabila suatu perusahaan memiliki tata kelola perusahaan yang baik maka tidak perlu berupaya menghindari pajak untuk menghindari biaya-biaya, termasuk beban pajak. Anggota komite audit yang ada di perusahaan pun diharapkan mampu mengerti dan menganalisis laporan keuangan yang akan dipublikasikan perusahaan. Perusahaan juga diharapkan mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan, penulis menyimpulkan beberapa hal yang dapat diambil yaitu sebagai berikut:

- a. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun pengaruhnya berbanding terbalik, yang artinya, ketika kepemilikan institusional menurun, maka *tax avoidance* akan mengalami kenaikan, begitupun apabila kepemilikan institusional mengalami kenaikan, maka kesempatan untuk melakukan *tax avoidance* akan menurun.

- b. Komisaris independen berpengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti bahwa dalam perusahaan yang menjadi penelitian, komisaris independen berperan secara signifikan dalam pengambilan keputusan pajak strategis pada perusahaan pertambangan yang ada di Indonesia.
- c. Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, hal ini menandakan bahwa kualitas audit tidak berkontribusi dalam upaya kemungkinan perusahaan pertambangan yang ada di Indonesia untuk melakukan penghindaran pajak.
- d. Komite audit berpengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyaknya jumlah komite audit, maka diduga semakin baik pula perusahaan dalam melakukan manajemen pengawasan terhadap penghindaran pajak.
- e. Kompensasi kerugian fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa kompensasi rugi fiskal itu sendiri tidak berkontribusi terhadap penghindaran pajak di perusahaan pertambangan yang ada di Indonesia.

Beberapa keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

- a. Sampel penelitian yang dilakukan hanya menggunakan perusahaan pertambangan saja, sehingga hasil penelitian ini tidak bisa digeneralisasi untuk ranah yang lebih luas seperti sektor industri.
- b. Variabel penelitian yang digunakan untuk memprediksi penghindaran pajak perusahaan masih belum cukup banyak, tercermin dari nilai R square sebesar 50,4%.
- c. Penelitian ini hanya dilakukan selama 3 tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

Berdasarkan keterbatasan penelitian tersebut, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

- a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan dengan menggunakan sektor industri selain pertambangan, seperti contohnya industri keuangan, pertanian, perbankan atau jasa.
- b. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel lain yang mempengaruhi penghindaran pajak diluar variabel yang digunakan dalam

penelitian ini, seperti contohnya kepemilikan manajerial dan ukuran dewan direksi.

- c. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menambah masa penelitian, misalnya 5 tahun untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal.

5. REFERENSI

- Abdul Haris Romdhon. (2015). Good Corporate Governance (GCG) Dalam Perbankan Syariah ISSN: 1412-629X. *Akuntansi Dan Pajak*, 16(01), 124–130.
- Alviyani, K., Surya, R. A. S., & Rofika. (2016). PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, KARAKTER EKSEKUTIF, UKURAN PERUSAHAAN, DAN LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE). *Faculty Of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia*, 4(1), 1960–1970.
- Beer, S. (2018). *International Corporate Tax Avoidance: A Review of the Channels , Magnitudes and Blind Spots*. (July).
- Chen, S., Huang, Y., Li, N., & Shevlin, T. (2019). How does quasi-indexer ownership affect corporate tax planning? *Journal of Accounting and Economics*, 67(2–3), 278–296. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2018.01.001>
- Hendro Subroto, Danarsi, S. N. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Mobil Dengan Diberlakukannya Pajak Progresif Di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 18(01), 45–55. <https://doi.org/10.29040/jap.v18i01.83>
- Jamei, R. (2019). PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Kovermann, J., & Velte, P. (2019). The impact of corporate governance on corporate tax avoidance—A literature review. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 36, 100270. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2019.100270>
- Lestari, J., & Solikhah, B. (2019). *The Effect of CSR , Tunneling Incentive , Fiscal Loss Compensation , Debt Policy , Profitability , Firm Size to Tax Avoidance*. 8(1), 31–37. <https://doi.org/10.15294/aaj.v8i1.23103>

- Marfirah, D., & SyamBZ, F. (2016). Pengaruh Corporate Governance dan Leverage terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(2), 91–102.
- Pratiwi, A. E. (2018). *PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, PROPORSI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, RETURN ON ASSET, LEVERAGE DAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL TERHADAP TAX AVOIDANCE*.
- Reinaldo, R. (2016). *PENGARUH LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN, ROA, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL, DAN CSR TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUBSEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN TERDAFTAR DI BEI 2013 - 2015*. *JOMFekom*, 4(1), 1960–1970.
- Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 17(02), 61–72. <https://doi.org/10.29040/jap.v17i02.210>
- Sunarsih, U., & Oktaviani, K. (2016). Good Corporate Governance in Manufacturing Companies Tax Avoidance. *Etikonomi*, 15(2), 85–96. <https://doi.org/10.15408/etk.v15i2.3541>
- Supatminingsih, S., & Wicaksono, M. (2017). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Lingkungan Perusahaan Bersertifikasi Iso-14001 Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 17(01). <https://doi.org/10.29040/jap.v17i01.54>
- Tandean, V. A., & Winnie, W. (2016). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period 2010-2013. *Asian Journal of Accounting Research*, 1(1), 28–38. <https://doi.org/10.1108/ajar-2016-01-01-b004>
- Wulandari, R. A. (2019). Tata Kelola Perusahaan Oleh Direksi PT BPR Dharma Nagari Dengan Menerapkan Prinsip Good Corporate Governance. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>